



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA SATU AN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
PESAWARAN)**

***ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE VALUE OF FINANCIAL
REPORTING INFORMATION OF REGIONAL GOVERNMENT (STUDY ON A
REGIONAL OFFICE WORK UNIT IN PESAWARAN REGENCY)***

Putri Salma¹, Ersi Sisdianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: putrisalma886@gmail.com¹, ersisisdianto@radenintan.ac.id²

Article history :

Received : 13-12-2024

Revised : 14-12-2024

Accepted: 16-12-2024

Published: 18-12-2024

Abstract

This study aims to identify the factors that influence the value of financial reporting information of local governments in regional work units in Pesawaran Regency. Through quantitative data analysis, this study found that the quality of human resources, utilization of information technology, and internal control systems significantly affect the value of financial reporting information. The results of this study provide important implications for local governments in improving the quality of financial reporting.

Keywords: *regional apparatus work unit, human resource quality, information technology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pesawaran. Melalui analisis data kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci : *satuan kerja perangkat daerah, kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi,*

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan di pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan memberikan informasi terperinci tentang kegiatan keuangan dan kinerja pemerintah, laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan, termasuk warga negara, pejabat terpilih, dan kreditor, membuat keputusan yang tepat. Selain itu, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dan kemampuannya untuk menarik investasi dan mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek penting. Dengan cara ini, pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah daerah.



Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat transparansi dan pengawasan, yang memungkinkan terdeteksinya potensi penipuan, pemborosan, atau salah urus dana. Hal ini terutama penting untuk memastikan uang pembayar pajak digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Tanpa pelaporan keuangan yang akurat, akan sulit bagi para pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pentingnya pelaporan keuangan tidak dapat dilebih-lebihkan dalam ranah tata kelola pemerintahan dan administrasi publik yang baik.

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Seuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlakukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.



Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tahun 2013 BPKP secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program/keahlian lintas sektoral, kebudayaan umum negara/daerah dan kegiatan pengawasan lainnya atas tugas presiden. BPKP secara rutin juga melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Istilah kualitas SDM berasal dari kata job performance atau actual performane (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Hal ini sejalan dengan pendapat Mangkunegara yang mengemukakan bahwa, kualitas (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kualitas SDM adalah sesuatu yang penting bagi instansi, khususnya kualitas pegawai yang bisa membawa Perusahaan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Baik atau buruknya kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh pada baik buruknya kualitas sumber daya manusia instansi.

Kualitas SDM bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi perusahaan, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh para pegawai akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau Perusahaan tersebut.

Menurut Sutrisno (Sutrisno (2010: 65) indikator pengukuran pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan; yaitu pemberian kesempatan bagi setiap pegawai untuk mendapatkan Pendidikan sesuai dengan divisi yang ditekuni.
- b. Pelatihan; yaitu pemberian kesempatan bagi setiap pegawai untuk mengembangkan potensi karir pegawai dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu

2. Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Pasal



1 Ayat (26) menyatakan SKPKD selaku Entitas Pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan dalam Pasal 5 Ayat (2) menyatakan penyajian laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjelaskan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan Masyarakat guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) (Hess 2007). Silver menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dasar untuk mengetahui (basic right to know) dan mendapatkan informasi perihal apa yang dilakukan pemerintah, serta mengetahui bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Pelaporan keuangan di sector public merupakan bentuk wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan agar mencapai good governance. Pemerintah menyebarluaskan laporan keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan untuk para pengguna yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan untuk masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Cara untuk mewujudkan good governance yaitu dengan melakukan perbaikan dalam laporan keuangan, pemerintah harus bias menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan keterbukaan pada publik, sebab kegiatan yang dilakukan pemerintah merupakan rangka dalam melaksanakan amanat dari masyarakat

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Pesawaran terutama melibatkan analisis kuantitatif, menggunakan teknik regresi linier ganda untuk menilai berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan keuangan. Studi ini menggunakan metode sampling yang bertujuan, dengan fokus pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD, untuk mengevaluasi dampak variabel seperti pendapat audit, temuan audit, dan karakteristik pemerintah daerah pada tingkat pengungkapan. Selain itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian internal diperiksa sebagai penentu penting dalam penyusunan laporan keuangan ini. Analisis ini juga mempertimbangkan pengaruh



langkah-langkah legislatif dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan, semakin memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan dalam pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan dokumen penting yang mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik pemerintah daerah, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP). Penerapan SAP yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan dan pemahaman aparat pemerintah daerah mengenai standar ini.

Selain itu, karakteristik pemerintah daerah, seperti ukuran dan kompleksitas organisasi, juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangan mereka. Hal ini juga didukung oleh temuan bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih lengkap, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Audit juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil audit yang baik dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki laporan keuangan mereka dan meningkatkan transparansi. Sebaliknya, hasil audit yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya pengungkapan informasi keuangan kepada publik. Oleh karena itu, penting bagi Pemda Kabupaten Pesawaran untuk memperhatikan hasil audit dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Dalam konteks Kabupaten Pesawaran, upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi yang efektif, dan komitmen dari pimpinan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, laporan keuangan Pemda Kabupaten Pesawaran dapat mencerminkan kinerja yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi, yang secara kolektif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja karyawan. Selain itu, pendapatan pemerintah daerah (PAD) dan dana transfer memainkan peran penting dalam alokasi belanja modal, meskipun dampaknya terhadap



pengeluaran aset tetap tampak terbatas. Selain itu, pendapatan daerah secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menyoroti pentingnya manajemen pendapatan yang efektif. Faktor-faktor seperti pendapat audit, independensi, dan kekayaan regional juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengungkapan keuangan, penting untuk membangun kepercayaan publik. Secara keseluruhan, elemen-elemen ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara praktik manajemen keuangan dan hasil tata kelola daerah di Pesawaran

DAFTAR PUSTAKA

- Hess, D. (2007). *Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency*. Business Ethics Quarterly.
- Jauhari et al. "Implementation of Good Governance, Utilization of Information Technology, And Reliability of Government Financial Statements" Journal of Accounting and Strategic Finance
- Mainingrum et al. "The Effect of Audit Findings, Follow-Up Audit Recommendations, And BPK Opinions from The Previous Year on The Determination of Opinions in Local Government Financial Statements" Economics Business Accounting & Society Review (2023)
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1).
- Meihana et al. "Analysis of the articulation of Local Government Financial Statements and Their Effect on Its Quality" The Indonesian Journal of Accounting Research (2021)
- Sari "The Effect Of Local Government Commitment And Audit Opinion On Disclosure Of Local Government Financial Reports In Indonesia" Journal of Social Science (JOSS) (2022)
- Silver, D. (2005). *Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace*. Public Relations Strategist.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gusnaini et al. "The Effect of Regional Government Size, Legislative Size, Number of Population, and Intergovernmental Revenue on The Financial Statements Disclosure" European Journal of Business Management and Research (2020)
- Lubis et al. "The Moderating Role of Financial Supervision toward Quality of Financial Reporting at Deli Serdang, Indonesia" International Journal of Finance Economics and Business (2022)